

Perbatasan dan Keamanan Kawasan

*Yusnارida Eka Nizmi**

Abstract

This article will focus on how immigration relates to policy of states in cementing their regional peace and security. After World War II, European states started to engage in the long process of Treaty of Rome that freedoms of movement should be achieved between member states for workers. European integration project, in the context of economic and political liberalism by globalization, focuses on removal of borders. The movement across the EU's internal borders become easier for those common red passport, the states which promote this movement has to make common policy for those people who wish to enter Europe. The development of asylum and immigration policy is an important tool for setting an integrated identity. In order to make clearly defining the boundary between "them and us" related to between migration and regional security which this research will be focused in Europe and North America.

Keywords: *Immigration, Migrant, Border ,European Union, North America.*

Pendahuluan

Immigrasi seringkali digambarkan sebagai salah satu akibat dari kemunculan globalisasi.¹ Immigrasi akan melibatkan banyak negara ketika berhubungan dengan masalah keamanan. Migrasi sebagai potret pergerakan massal yang mayoritas pelakunya adalah kaum miskin, yang bergerak menuju negara-negara kaya. Beberapa kasus migrasi tidak berdampak buruk pada apapun, namun banyak juga kasus migrasi yang berdampak buruk pada keamanan; seperti pada kasus-kasus perdagangan orang, eksplorasi dan perbudakan modern yang harus ditangani secara serius. Tragedi dimana perempuan-perempuan yang menjadi korban perdagangan orang berujung pada lingkaran prostitusi atau para pengungsi yang dipaksa keluar dari tanah kelahirannya adalah fakta yang bisa dilihat dalam dokumen yang terangkum secara baik oleh lembaga seperti *International Organization for Migration* (IOM) dan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). Dokumen dari lembaga-lembaga tersebut menunjukkan bahwa migrasi umumnya terjadi dari negara-negara miskin menuju negara yang lebih kaya dari negaranya.² Potret dimana migran-migran illegal yang memasuki Eropa, Australia dan Amerika Serikat bersembunyi dalam truk yang berisi tomat, sayuran bahkan sampah adalah potret nyata dari sejumlah kecil migran yang ada.

Bagaimana migrasi terkait dengan isu-isu keamanan adalah fenomena yang menarik untuk dianalisa. Pada perang Irak (1991 dan 2003) banyak negara yang saling berhubungan dalam mengevakuasi warga negaranya- para migran yang berada di negara-negara Teluk yang kaya minyak (umumnya berasal dari negara-negara sedang berkembang) yang bekerja dalam berbagai sektor demi mendapatkan penghasilan seperti

* Dosen Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau

¹ Lihat Saskia Sassen, *Globalization and Its Discontents*, New York: New York Press, 1998.

² Lihat laporan SOPEMI, Trends in International Migration Report and IOM's World Migration Report, dari 2002 dan 2003.

pembantu rumah tangga, pengasuh anak atau para pekerja kasar yang upahnya sangat minim atau bahkan para pekerja professional yang bekerja di ladang-ladang minyak. Perang kedua di Irak memberi pengaruh tersendiri bagi Amerika Serikat yang kedatangan sejumlah imigran yang mencari pekerjaan, namun belum mendapatkannya, banyak warga negara lain yang juga menawarkan diri untuk bekerja apa saja di militer Amerika Serikat.

Tulisan ini akan mencoba bahasan pada keterlibatan negara dalam konflik-konflik dimana ada eksodus pengungsi yang berpengaruh pada perdamaian dan keamanan regional. Baik Pengungsi maupun para migran “yang irregular”, tidak memiliki jalur khusus migrasi yang legal bagi mereka menjadi tantangan tersendiri bagi keamanan Eropa yang selama ini dikenal aman. Uni Eropa memberi perhatian pada para pencari suaka dan UE memberikan perlindungan pada orang-orang yang terusir karena konflik dan mencari rasa aman di Uni Eropa, UE juga mengevakuasi ke negara-negara Eropa lainnya demi alasan kemanusiaan. Ini adalah keputusan pertama yang dibuat Eropa, yang dipengaruhi oleh Konflik Balkan pada tahun 1990 dimana Eropa banyak kedatangan Orang-orang yang meninggalkan Balkan karena konflik.

Tulisan ini akan melihat 3 bentuk dari migrasi: Migrasi antar negara dalam satu kawasan/wilayah yang mencari integrasi baik politik maupun ekonomi; Koordinasi antar kebijakan dan pendekatan terhadap orang para migran yang datang dari luar wilayah tersebut- termasuk juga tujuan utama dari kebebasan masyarakatnya untuk memasuki negara-negara dalam satu wilayah, terakhir adalah kedatangan para pengungsi dan pencari suaka yang banyak berdampak pada keamanan secara luas dan terjadinya konflik. Ragam dari migrasi ini secara umum dipandang berbeda; ada yang memandang sebagai kekuatan keamanan regional, namun ada juga yang beranggapan sebagai fenomena yang dapat melemahkan keamanan regional. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, mengapa satu fenomena bisa dilihat dalam beragam cara, tergantung pada siapa yang melakukan migrasi, dan kemana migrasi itu ditujukan.

Tulisan ini akan memfokuskan pada perbatasan, pengaruh perbatasan terhadap beragam aktivitas yang dipandang sebagai aktivitas yang positif (termasuk aktivitas migrasi). *European Commission* melihat isu perbatasan sebagai isu yang menarik dalam penggabungan Uni Eropa dengan kata lain peluang-peluang baru akan selalu disertai dengan tantangan-tantangan baru.³ Efisiensi dan manajemen keamanan perbatasan sangat diperlukan baik untuk melindungi perbatasan maupun memfasilitasi terjadinya perdagangan. Dalam rangka mencari kebebasan untuk masuk ke negara-negara Uni Eropa, seluruh negara Uni Eropa perlu memperhatikan isu wilayah yang sudah tak memiliki batasan ini.

Problem mereka muncul dalam fokus bahasan kedua dalam tulisan ini bahwa perbatasan eksternal secara keseluruhan perlu untuk diperkuat sebagai ganti dari tidak adanya perbatasan internal. Bagaimanapun, pemerintah perlu untuk membuat kebijakan yang umum, tidak hanya karena mereka terintegrasi secara politik, namun juga karena perspektif praktis bahwa mereka tidak menginginkan adanya friksi di perbatasan baik antar perbatasan internal antar Uni Eropa ataupun ketika memasuki negara lain. Untuk memasuki perbatasan, orang harus memiliki dokumen yang benar dan lengkap: jika di lapangan terjadi friksi, harusnya pembuat kebijakan sudah membuat aturan/kebijakan yang

³ Comission of the European Communities, *Communication from the Comission: Paving the way for a New Neighbourhood Instrumen*, Brussels, 1 Juli 2003 COM (2003) 393 final, p.4, paragraf 6.

sesuai untuk mengatasi ini, seperti di kedutaan-dimana visa biasanya menjadi persoalan yang seringkali terjadi. Begitu juga pengungsi, (orang tanpa perlindungan dalam lingkup negara) yang sering dianggap sebagai orang yang melakukan pelanggaran atau mencari keuntungan (tergantung perspektif yang dianut), pergerakan yang tidak terarah, tiba di suatu negara tanpa dokumen yang lengkap untuk bisa lolos di perbatasan.

Pembahasan

Migrasi Intra-Regional

Banyak politisi yang Pro Uni Eropa dan para komentator memandang migrasi antar Uni Eropa adalah sesuatu yang memang sudah seharusnya terjadi, dan akan membawa manfaat serta terjadinya peningkatan migrasi. Meskipun, beberapa politisi juga ada yang memandang bahwa migrasi masyarakat UE adalah sebuah ancaman, ketika mereka mendapatkan pekerjaan, berarti “mencuri” tempat warga asli, atau migrasi pajak dan keamanan sosial. Amerika Serikat mengalami peningkatan perdebatan terhadap perlunya legalisasi atau regulasi imigrasi dari Meksiko, disamping harus memperkuat pengawasan perbatasan dalam menghadapi imigran-imigran baru, dan Kanada sedang dalam perdebatan untuk mengkaji bagaimana cara memperkuat perbatasan antara negaranya dan AS. Proses diskusi di Amerika Utara juga dilakukan di UE, contohnya tidak hanya fokus pada orang yang melakukan pergerakan, tapi juga fokus pada simbol-simbol pergerakan mereka termasuk kendaraan (truk) yang mereka gunakan, dan mempertanyakan pajak serta kesehatan mereka.

Treaty Roma 1957 adalah rancangan pertama bagi kebebasan untuk pindah dari satu negara ke negara lain di Eropa. Bagi para pekerja, klub baru yang beranggotakan negara ini dikenal sebagai *European Economic Community*. Italia termasuk negara para emigran. Jerman dan negara-negara di Utara Eropa juga memberi akses yang mudah bagi para pekerja yang berdomisili di wilayah Selatan. Wilayah Eropa terpecah karena Perang Dunia II, dan pembangunan infrastruktur dilakukan oleh para pekerja migran. Termasuk para pekerja Italia yang mencari pekerjaan di negara-negara Eropa dan mengirim uang ke negaranya, yang berkontribusi dalam rekonstruksi Eropa. EEC adalah forum ekonomi: dan para pekerja adalah faktor produksinya. Bagaimanapun, para pekerja tersebut adalah manusia yang punya keluarga, dan membuat keputusan mengenai dimana mereka tinggal (dan bekerja) berdasarkan banyak faktor yang terkadang subjektif, contohnya pertimbangan sederhana apakah disana ada tempat bekerja yang bisa menjadi sumber pendapatan yang baik dan tempat tinggal yang nyaman. Selama bertahun-tahun, sejumlah resolusi dan program telah disepakati oleh sejumlah negara dalam EEC. Kesepakatan-kesepakatan ini memiliki pengaruh terhadap hak yang melekat pada warganegara negara anggota untuk bergerak dari satu negara ke negara lain baik untuk bekerja atau berkumpul dan menetap dengan anggota keluarga. Proyek ini memberi ruang yang besar bagi orang Eropa yang bekerja lintas Eropa dan berkembang menjadi ide utama penggabungan Eropa di awal integrasinya. Warganegara masing-masing anggota Eropa menjadi warganegara UE dalam *Maastricht Treaty* tahun 1992.

Setelah tahun 1997, lima tahun setelah hak izin tinggal termasuk juga hak politik yang melewati lintas Eropa disetujui dalam *Maastricht Treaty*, pimpinan Komisi Simone Veil melaporkan bahwa hanya sekitar 5.5 juta dari seluruh total masyarakat Eropa yang berjumlah 350 juta orang mengambil peluang ini. Ini berarti hanya sekitar 1.6 persen dari

total masyarakat Uni Eropa warga negara senior dan para pelajar adalah termasuk golongan masyarakat yang melakukan migrasi. Para pelajar termasuk kelompok pelaku migrasi antar negara UE yang terus mengalami peningkatan untuk menempuh pendidikan setidaknya selama beberapa bulan dan sering sekali untuk waktu satu tahun. Termasuk juga orang-orang yang belajar bahasa. Pada pertengahan tahun 1990-an, para pelajar mengambil peluang “setahun diluar negeri” terkait dengan studi mereka: dan mimpi untuk penyataan identitas Eropa setidaknya melalui kelompok elit pelajar ini mulai menjadi satu kenyataan. (realitas ini kemudian menjadi tema yang khusus diangkat dalam film independen seperti *L'Auberge Espanol* pada tahun 2003;⁴ pengalaman para pelaku film menyakini bahwa film ini akan cukup baik untuk membuat orang ke bioskop menontonnya). Peningkatan mobilitas migrasi juga terjadi di kalangan profesional, dengan orang bekerja di salah satu negara UE secara resmi akan menambah identitasnya (selain warganegara asal negaranya). Contohnya adalah para pekerja konstruksi, yang bekerja untuk beberapa minggu, kemudian kembali ke negaranya, sebelum mendapatkan kontrak kerja baru lagi di negara UE yang berbeda.

Tidak ada kawasan lain selain Eropa yang menerapkan sanksi dan resiprokal migrasi secara total. Kawasan lain juga tidak ada yang seperti Eropa bersungguh-sungguh untuk menghilangkan perbatasan, membuat pergerakan migrasi menjadi bebas bagi warga negara anggota secara total (meskipun dalam beberapa kasus, aturan-aturan lokal masih berlaku, namun tetap memberi fasilitas migrasi bagi masyarakat di perbatasan). *The North American Free Trade Agreement (NAFTA)* telah membuat visa khusus bagi para pelaku bisnis untuk melakukan perjalanan dan bekerja antar negara Kanada, AS dan Meksiko. Namun hal ini tidak berpengaruh apa-apa terhadap hubungan masyarakatnya di tiga negara tersebut, yang sering terjadi di beberapa kasus justru migrasi illegal. AS dan Meksiko justru berencana untuk membuat kesepakatan yang akan meregulasi status sejumlah imigran Meksiko yang datang ke AS secara massal. Kesepakatan ini diharapkan dapat membuka jalur-jalur legal bagi para migran yang baru. Namun kesepakatan ternyata gagal (justru menimbulkan ketegangan antara dua negara tersebut). Tidak hanya itu, migrasi ternyata juga berpengaruh terhadap kehidupan, dan keamanan di tiga negara tersebut juga menjadi rentan. Dalam hal integrasi, kawasan ini mungkin bisa bercermin pada proses integrasi Eropa dalam menciptakan kesepakatan “smart border” bagi para pelaku bisnis dan tujuan-tujuan komersil lainnya untuk memberi akses seluas mungkin dan merancang kesepakatan yang saling menguntungkan antar negara.

The US–Canada Action Plan for Creating a Secure and Smart Border (30 points) termasuk standar-standar untuk menjamin orang yang melakukan migrasi; menjamin perpindahan barang; menjamin infrastruktur, maka diperlukan dan koordinasi dan saling berbagi informasi untuk memperkuat tiga tujuan tersebut. Fokus utama adalah membuat aturan yang mengizinkan adanya migrasi bebas antar negara, yang mungkin juga bisa disebut sebagai “keamanan ekonomi”⁵. Dan meningkatkan rasa percaya antara dua negara tersebut untuk memberi izin memasuki negaranya.

Namun bagaimanapun, “smart border” tetaplah sebuah perbatasan. Smart border antara AS dan Kanada yang tidak bisa dilepaskan dari globalisasi dan kebutuhan untuk memfasilitasi pergerakan barang dan tenaga kerja antar negara tersebut. Negara-negara ini pada faktanya belum melihat bahwa liberalisasi penuh akan menguntungkan mereka.

⁴ *L'auberge Espagnole*, film director oleh Cedric Klapisch, <http://www.marsfilms.com/site/auberge/>.

⁵ Deborah Waller Meyers, “Does” Smarter” lead to safer” an assesment of the Boarder Accords with Canada and Mexico’, MPI Insight, No. 2 June 2003.

Action Plan yang dibuat oleh mereka justru menunjukkan bahwa antar negara tetangga tersebut belum ada rasa saling percaya. Meskipun Kanada secara “halus” memberi izin pada masyarakat AS untuk memasuki negaranya namun sepertinya masyarakat AS justru tidak ingin mendapatkan masyarakat Kanada memasuki wilayahnya. Pada faktanya untuk memasuki AS tidak bisa dengan mudah dilakukan (khususnya bagi kelompok yang masuk daftar terrorist) lebih sering masuk AS melalui jalur udara yang datang dari Eropa, Asia, Afrika atau Timur Tengah. AS biasanya mengandalkan kedutaan mereka dalam pemberian visa untuk memberi izin siapa saja yang dianggap layak untuk memasuki AS dan siapa yang tidak punya akses untuk itu.

Di Asia, migrasi antar negara ASEAN juga belum dianggap sebagai suatu keuntungan secara ekonomi, dalam banyak kasus para migran justru banyak yang ditolak dan dipulangkan. Negara-negara ASEAN belum mengembangkan kesepakatan migrasi regional dimana para migran diakui haknya layaknya warganegara asli negara tersebut. Banyak negara-negara di Asia memang memberi akses warganya untuk migrasi ke negara-negara tetangga namun hanya semata-mata untuk peningkatan pendapatan negara melalui *remittance*. Hal ini mungkin bisa menjadi awal yang baik bagi wilayah ini untuk membuat regulasi pada immigrasi dan hal migran yang melintasi negara-negara dalam kawasan tersebut.

Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi terjadi migrasi intra-regional sepertinya sangat erat berhubungan dengan perbatasan dan persyaratannya. Tingginya mobilitas pekerja, barang dan jasa atau integrasi pasar tenaga kerja pada dasarnya adalah peluang-peluang kerja yang terkait dengan ekonomi dimana pemerintah bisa berperan untuk menambahnya atau bahkan mengurangi peluang ekonomi tersebut melalui migrasi. Hal ini bisa dibuktikan tidak hanya di UE namun juga pada praktek yang dilakukan oleh NAFTA dan migrasi di Asia. Pencarian identitas yang sama untuk sebuah kawasan, memerlukan integrasi yang tak berbatas dalam sistem ekonomi dan politik disamping juga menyatukan sosial budaya sebagaimana yang menjadi faktor kedua bagi Eropa. Namun tidak demikian dengan Amerika Utara dan Asia yang tidak memiliki motivasi yang sama untuk membuat identitas kawasan. Perbatasan antara Meksiko dan AS serta Kanada dan AS belum menunjukkan akan adanya identitas regional yang sama. Sebagaimana yang sudah diterapkan masyarakat Eropa, dimana migrasi justru difasilitasi antara negara dengan tujuan untuk mendapatkan keamanan dan perdamaian regional. Ketika migrasi dipandang sebagai elemen ekonomi dan politik serta budaya secara potensial, maka menarik untuk melihat bagaimana beberapa fenomena migrasi ditangani secara berbeda. Dalam pandangan yang sempit, kerjasama regional justru cenderung dilihat kurang baik masuknya pendatang dari luar bukan suatu yang baik namun harus diperketat.

Kebijakan Kawasan

Ketika wilayah seperti Uni Eropa menciptakan kebebasan untuk migrasi bagi warga negaranya di internal kawasan mereka, ternyata masih ada juga negara di kawasan Eropa yang ingin menghentikan atau setidaknya membatasi imigrasi dari luar negara mereka. Beberapa pelaku imigrasi memang terkadang dibutuhkan, Beberapa negara anggota UE masih “mengimpor” dokter, perawat, tenaga pengajar, dan tenaga kerja profesional lainnya pada dekade terakhir ini. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah jika imigrasi dari luar dihentikan atau dibatasi, melalui jalur apa “asset” berharga ini bisa masuk ke negara mereka. Berbeda negara dengan ragam kepentingan yang berbeda jelas memiliki sudut

pandang masing-masing, karena itu lah diperlukan diskusi regional dalam kerangka kerja kebijakan umum yang disepakati bersama. Kebijakan-kebijakan tersebut harus membuat aturan yang terkait dengan perbatasan siapa saja yang diizinkan atau dibutuhkan untuk memasuki perbatasan tanpa kesulitan yang signifikan.

Diskusi mengenai sistem apa yang disepakati terkait dengan imigrasi antar negara anggota UE telah berlangsung hampir selama dua dekade, dan dipandang sebagai kunci penting dalam proses integrasi Eropa seiring dengan perkembangan Euro. Sebelumnya, sama dengan kawasan-kawasan lain awalnya integrasi Eropa masih berpijak pada pendekatan umum yaitu “orang asing” dianggap sebagai sebuah ancaman bagi kedaulatan negara untuk mengontrol dan mengatur perbatasan. Dalam kasus Amerika Utara, isu ini jarang menjadi bahan diskusi namun lebih kepada peningkatan kerjasama dalam isu-isu tertentu. Sebagai contoh, Kesulitan-kesulitan Meksiko mengatasi migrasi internalnya yang berasal dari Selatan wilayahnya disebabkan karena adanya persepsi bahwa mereka hanya melakukan transit untuk masuk ke AS dan otoritas Meksiko menerima peningkatan bantuan dan instruksi dan pihak immigrasi AS dan jasa pengawasan perbatasan. Contoh lain adalah kekhawatiran AS terhadap orang-orang selundupan yang berasal dari Cina menuju Kanada dan pergerakan komunitas orang selundupan ini relatif tidak terkontrol oleh AS, khususnya untuk wilayah New York.

UE menangani isu ini sebagai satu rangkaian persoalan yang memang harus ditangani dengan baik. Negara-negara anggota telah menyepakati apa yang mereka butuhkan untuk disepakati dan bagaimana mereka membuat kesepakatan tersebut serta siapa saja yang terlibat. Ada kemajuan dari konsultasi-konsultasi informal mengenai isu-isu migrasi pada pertengahan tahun 1980-an hingga akhirnya sepakat menjadi *Maastricht Treaty* pada 1992 dan terbentuknya draft berdasarkan aturan-aturan komunitas Eropa, hingga terbentuk *Treaty of Amsterdam* pada tahun 1997. Tahapan terakhir yang efektif pada Mei 1999, dianggap sebagai elemen penting bagi perkembangan *European Commission*.

Bagian yang sulit dari proses ini adalah persepsi mengenai masalah yang berbeda dari tiap-tiap negara. Negara Inggris tetap mempertahankan keputusan terkait dengan pencari suaka dan imigrasi dibawah *Amsterdam Treaty*, artinya ini harus menjadi rujukan utama, kalau ingin berdiskusi lebih lanjut dengan Inggris mengenai pencari suaka dan immigrasi atau tergantung pada apakah pemerintah Inggris memandang bahwa solusi Eropa lebih baik dari kebijakan nasional mereka. Irlandia juga sama dengan Inggris. Denmark dari awal telah memilih untuk keluar dari topik ini karena pemerintah tidak ingin terlibat dengan aturan UE dalam persoalan ini, meskipun akan lebih baik jika pemerintah Denmark ikut berpartisipasi dalam diskusi politik dan keputusan UE.

Meskipun respon terhadap isu bisa berbeda-beda, kesepakatan tetap masih bisa dicapai pada beberapa hal-atau kesepakatan dasar mengenai isu perbatasan. Karena pada dasarnya menciptakan isu hambatan perbatasan yang sama lebih mudah daripada menyepakati kebijakan secara bersama. Jadi, topik-topik mengenai immigrasi irregular, penyelundupan, pemulangan pencari suaka dan imigran lainnya, program-program untuk kelompok pengungsi di negara asal, prinsip-prinsip seperti “selamatkan negara ketiga” dan “selamatkan negara asal” adalah topik-topik utama yang bisa dibahas dalam diskusi. Pasca 9/11, kemampuan untuk fokus pada issu ini menjadi lebih kuat demikian juga dengan

proses penggarapan kebijakan. Isu lain yang juga muncul dalam diskusi adalah rencana quota imigrasi ekonomi dan penempatan pengungsi.⁶

Menemukan cara untuk mengizinkan orang memasuki UE secara legal adalah hal yang tidak mudah. Semakin banyak perbatasan yang bisa dimasuki secara legal, maka akan semakin banyak orang yang masuk tidak teratur. Orang ke Eropa karena ingin mendapatkan pekerjaan, rasa aman dan karena alasan lain pada intinya mereka datang untuk alasan ekonomi dan mencari perlindungan. Fakta bahwa mereka masuk lewat cara “illegal” akan membuat individu tersebut di cap “ancaman”. Karena mereka tidak paham dengan otoritas legal, bisa jadi mereka adalah terroris atau kriminal atau membawa penyakit menular. Jika kita tidak memerikasanya dengan benar, atau hanya memindahkan orang tersebut, bisa sangat terlambat. Beberapa dari orang yang memasuki UE tanpa dokumen lengkap (atau memasuki UE dengan illegal) adalah individu yang membahayakan orang lain namun ada juga yang memasuki UE murni alasan untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik bagi keluarga mereka. Bagi mereka yang masuk secara illegal, harus berhadapan dengan prilaku diskriminasi karena mereka mendapat label “imigran illegal”. Meskipun telah ada diskusi di Brussel yang fokus membahas integrasi imigran dan anti rasisme.

Dalam banyak isu migrasi, secara retorika, setidaknya para politisi melintasi UE secara teratur dalam pikiran mereka dengan keyakinan mereka mengenai solusi “penyatuan Eropa”. Khususnya, isu-isu tersebut dibahas secara serius dan pernyataan politik yang memprovokasi yang diucapkan oleh para menteri luar negeri, seperti pernyataan bahwa “kita tidak bisa menanganinya sendiri: immigrasi dan pencari suaka adalah masalah yang dihadapi Eropa”. Meskipun, menteri luar negeri yang sama pula yang tidak menyepakati kesepakatan yang dibuat oleh Eropa di Brussels. Pernyataan-pernyataan tersebut menghadapi masalah yang lebih besar jika harus ditangani secara sendiri oleh negara yang bersangkutan. Akan lebih baik jika masalah immigrasi ditangani secara kolektif.

Tidak ada kawasan yang mengambil langkah mudah bagi penanganan immigrasi dan pencari suaka dari beragam negara. Dan juga tidak ada kawasan di dunia ini yang memberi kemudahan mobilitas antar kawasan seperti yang dilakukan Eropa. Mudahnya melakukan perjalanan antara negara UE bagi sesama anggota UE menunjukkan tingginya kepercayaan yang mereka miliki terhadap negara satu kawasan. Kepercayaan adalah kunci utama dalam isu ini, karena isu ini membutuhkan identifikasi untuk mengembangkan proyek keberhasilan program ini.

Rasa percaya adalah alasan utama ditandatanganinya *Smart Border Declaration* antara AS-Kanada pada tahun 2001. Termasuk juga kesepakatan-kesepakatan sebelum ini (seperti: *Shared Accord on Our Border* pada tahun 1995 dan *Border Vision* pada tahun 1997, serta *Canada-US Partnership Process* tahun 1999). AS dan Kanada memiliki kebijakan visa yang sama untuk 144 negara dan berbagi informasi mengenai kedatangan penumpang. membuat Standar yang sama dalam menjamin pengajuan pengungsi dan pencari suaka melalui pemeriksaan yang diperkirakan beresiko terhadap keamanan serta membuat database imigrasi mengenai siapa yang diizinkan masuk dan berapa jumlah yang

⁶ Lihat Joanne van Selm, Tamara Woroby, Erin Patrick and Monica Matts, Study on feasibility of setting up Resettlement Schemes in the EU member states or at EU level against the background of Common European asylum system and the goal of a common asylum procedure, at http://www.european.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/asylum/studies/resettlement-study-full_2003_e.pdf.

diperbolehkan. Ini mungkin bisa menjadi langkah yang baik bagi AS dan Kanada untuk membuat MoU seperti “safe third country”.

MoU yang diprakarsai oleh Kanada pada pertengahan tahun 1990-an tidak berhasil. Kanada sangat ingin kesepakatan disetujui, karena diperkirakan ada 40 persen pencari suaka yang mengajukan permohonan melalui Kanada untuk memasuki AS. Namun AS sepertinya tidak terlalu berminat untuk menandatangannya. Pengalaman Eropa dengan Konvensi Dublin menunjukkan bahwa sedikit gerakan bermanfaat pada terciptanya klaim “safe third country” yang bertujuan untuk memulangkan pencari suaka de negara patner untuk sementara.⁷ Baik Konvensi Dublin maupun Regulasi Dublin sedikit berbeda dengan Mou Kanada-AS, setidaknya karena yang dibahas dalam Mou hanya fokus pada pencari suaka yang melintasi perbatasa antar dua negara tersebut. Bagaimanapun, pengadilan akan terlibat dalam kasus ini karena terkait dengan proses transfer pencari suaka. Aturan pengadilan tersebut bisa jadi berbeda dengan hukum, kebijakan hukum internasional. Dan aturan-aturan tersebut bisa dikolaborasi dengan kesepakatan/aturan yang lain agar lebih efektif.

Krisis Pengungsi Regional dan Penangannya .

Dublin Regulation dan MoU *Safe Third Country* yang konsen terhadap orang yang mencari suaka orang yang mencari pengakuan terhadap status mereka sebagai pengungsi dan konsekwensi klaim terhadap perlindungan. Orang-orang ini tiba secara spontan di negara yang mereka anggap aman untuk mereka tinggali. Mereka tidak memiliki dokumen yang lengkap sebagaimana seharusnya, melakukan pendekatan untuk mendapatkan dokumen-dokumen resmi dari negara yang dekat dengan negara asalnya akan membuat situasinya menjadi tidak aman

Di Eropa, penanganan krisis pengungsi regional sejak tahun 1991 telah melalui beberapa tahapan yang melahirkan aturan/kesepakatan umum mengenai perlindungan yang bisa didapatkan, dan pengembangan mekanisme yang secara efektif membatasi akses prosedur suaka di negara-negara anggota UE. Negara-negara melihat adanya kebutuhan yang meningkat dalam menghadapi globalisasi dan beragam aspek yang menyertainya, untuk membatasi friksi yang kemungkinan akan muncul, mereka menyadari perlu saling bekerjasama untuk menjamin perlindungan bagi para pengungsi di negara pertama dimana para individu tersebut mencari perlindungan.

Teori bahwa perlindungan pengungsi adalah sebuah fenomena umum, dan negara-negara demokratis Barat memiliki kepentingan yang salam dalam hal kemajuan ekonomi dan keamanan, dan telah menandatangi instrumen internasional, dimana mereka menjamin perlindungan dengan cara yang sama terhadap para pengungsi yang benar-benar membutuhkannya. Negara-negara tersebut memandang perlu adanya upaya untuk mencegah hadirnya “asylum shopping” sebutan bagi para individu yang mencari perlindungan di negara dimana mereka kan benar-benar terjamin kehidupannya, atau mencari perlindungan di negara yang luar biasa sejahtera. Asumsi-asumsi menunjukkan bahwa negara selalu memandang negatif mengenai prilaku pengungsi dan pemerintah

⁷ Commission of the European Communities, Staff Working Paper, Evaluation of the Dublin Convention, Brussels, 13.06.2002, SEC (2001) 756. Hanya 1.7 persen dari seluruh pencari suaka di negara-negara UE yang ditransfer ke negara lain pada tahun 1998-1999 sebagai hasil dari Konvensi Dublin.

beranggapan bahwa para pencari suaka umumnya mencari kehidupan yang lebih baik bukan mencari rasa aman.

Konvensi 1951 berhubungan dengan status pengungsi yang bekembang dari dua kondisi di Eropa memfokuskan pada situasi yang menyebabkan adanya pengungsi (Perang Dunia II dan Perang Dingin). Konvensi ini secara effektif mencari mekanisme yang bisa dipahami oleh negara dan mau menerima individu-individu yang tidak lagi dilindungi oleh negara asalnya, sehingga untuk sementara setidaknya bisa mendapatkan perlindungan dari negara yang didatangi. Krisis pengungsi pada dekade 1951 paling banyak berasal dari pengungsi non-Eropa. Krisis pengungsi yang terbesar terjadi pada pertengahan pasca Perang Dingin merupakan orang-orang Eropa. Disintegrasi Yugoslavia dan perang Kroasia, Bosnia dan berlanjut dengan Kosovo, menggugah perhatian Eropa meskipun arus pengungsi terbesar saat itu terjadi di wilayah Afrika, Afghanistan, Irak, Somalia dan wilayah-wilayah lain. Ada dua alasan yang menjadi alasan Eropa saat itu: fakta geopolitik bahwa pengungsi dari kontinen yang lebih jauh dari Eropa sepertinya tidak mencari perlindungan ke Eropa seperti yang terjadi di Eropa bagian Barat, dan fakta bahwa penyelesaian arus pengungsi sebaiknya dimulai dari yang terdekat lalu kemudian menyelesaikan kebijakan imigrasi dan pengungsi.⁸

Konflik di Balkan bisa digambarkan sebagai efek “spill over” mereka terhadap gerakan pengungsi. Fakta bahwa gerakan pengungsi berpotensi terhadap munculnya konflik yang menyebar sampai ke Kroasia, Bosnia dan Serbia, termasuk juga Macedonia menjadi perhatian UE. Perkembangan yang reaktif muncul terhadap orang-orang yang tak punya tempat tinggal tersebut akibat konflik Balkan berpengaruh terhadap kondisi psikis dan keamanan militer serta migrasi regional. Terlepas dari perhatian terhadap keamanan negara atau regional, populasi dan sorotan media di satu sisi, politisi dan analis mengenai siapa yang membutuhkan perlindungan tidak hanya karena label “negara pelindung” namun juga karena sebagai manusia mereka memiliki hak, dan esensi inilah yang rentan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi. Dari *Universal Declaration of Human Rights* menyatakan bahwa manusia adalah aktor yang rentan sehingga membutuhkan rasa aman. Pada perkembangannya isu mengenai perlindungan memunculkan keinginan untuk menjamin “keamanan manusia”, namun diskusi mengenai ini, dan beberapa kebijakan dan pendekatan masih jauh dari proses.⁹

Semakin meluasnya penderitaan manusia akibat krisis di Bosnia dan di Kosovo melebihi pengungsi non Eropa selama Perang Dingin membuat para pemimpin negara harus dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Di satu sisi publik menginginkan mereka untuk peduli terhadap krisis kemanusiaan ini. Di sisi lain, muncul banyak wacana bahwa para pencari suaka secara umum mengganggu sistem yang sudah ada di negara-negara kaya. Pada kasus Bosnia, ada pengecualian yang diberlakukan, sehingga tidak ada perdebatan dalam pemberian perlindungan. Dalam rangka menghindari menjamin “full asylum”, negara-negara Eropa secara rutin memperketat aturan kebijakannya. Beragam pendekatan dibuat secara jelas untuk menekankan pentingnya fokus pada keamanan regional meskipun belum ada yang menjadi rujukan umum untuk berkoordinasi regional.

⁸ Joanne van Selm-Thorburn and Bertjan Verbeek, “The Chance of a Lifetime? The European Community’s foreign and refugee policies towards the conflict in Yugoslavia, 1991-95’, in Pat Gray and Paul’ t Hart (eds), *Public Policy Disasters in Western Europe*, London: Routledge, 1998.

⁹ Edward Newman and Joanne van Selm 9eds), *Refugees and Forced Displacement: International security, Human Vulnerability and the State*, Tokyo: UNU Press, 2003.

Pada tahun 1999, penjaminan perlindungan sementara terhadap lebih dari 50.000 pengungsi Kosovo, dibawah *Humanitarian Evacuation Programme* dan perlakuan terhadap pengungsi lainnya juga lebih baik. Memang masih ada kesulitan bagi negara-negara UE untuk berkoordinasi dalam memberi perlindungan. Evakuasi warga Kosovo dan krisis yang terjadi di negara tersebut membuat pemerintah UE sepakat untuk memberi perlindungan terlebih dahulu sesuai dengan UU yang sudah disahkan Eropa (*Temporary Protection Directive*) tahun 2002. Memfokuskan pada penanganan situasi yang bersifat massal yang diperkirakan akan mempengaruhi keamanan regional.

Krisis Kosovo, mengilustrasikan adanya kebingungan mengenai manfaat dan masalah yang berhubungan dengan pemberian perlindungan terhadap *displaced person* ini, karena penempatannya karena konflik, ada asumsi bahwa kedatangan mereka akan mengganggu dan mengancam keseluruhan kawasan. Reaksi Eropa sebagai sebuah kawasan terhadap krisis tersebut, dan persyaratan yang diberlakukan terhadap pengungsi secara umum, menjadi satu masalah bagi kontinen Eropa. Hampir semua negara di wilayah Eropa consen dengan masalah kemanusiaan, masyarakatnya didasarkan pada demokrasi dan hak asasi manusia. Perlindungan terhadap pengungsi adalah elemen penting bagi identitas bangsa Eropa sementara disisi lain ada ketegangan ketika pembuatan kebijakan berimbang pada perbatasan secara keseluruhan.

Dalam kasus Amerika Utara, selalu berhubungan dengan rejim Castro di Cuba dan program-program *resettlement* AS dan Kanada. Negara-negara Eropa sepakat pada satu poin kekhawatiran yang sama yaitu bahwa Slobodan Milosevic mempergunakan tameng pengunci Kosovo sebagai alat untuk “menyerang” wilayah lain.¹⁰ Castro juga menerapkan hal ini pada AS sebagai musuhnya. Krisis Mariel Boat pada tahun 1980-an dan 1994 dimana ada eksodus termasuk orang-orang “yang diizinkan” Castro untuk keluar dari Kuba dan para tahanan (tahanan politik maupun yang lain) dan pengungsi jenis lainnya. Respon AS memang cukup jelas dalam persoalan kemanusiaan, namun disisi lain AS juga mengembangkan kebijakan untuk mendeteksi siapa-siapa saja yang dianggap berbahaya. Kebijakan ini disebut dengan “wet feet/dry feet”. Jika warga Kuba ditemukan di dataran AS dan punya dokumen lengkap, mereka akan mendapatkan izin tinggal selama satu tahun setelah kedatangan mereka. Jika mereka ditemukan di Laut, mereka akan dibawa ke Guantanamo sesuai dengan kasus mereka, dan jika mereka tidak punya status pengungsi, mereka akan dikembalikan ke Kuba. Sebaliknya, jika mereka punya status pengungsi, mereka akan ditempatkan di negara selain AS. Hal ini juga berlaku bagi warga Haiti.

AS memfasilitasi penempatan mereka di negara lain baik dalam satu wilayah, Eropa dan Australia. Pada akhir Mei 2002, 152 warga Kuba dipindahkan ke sebelas negara yang berbeda yang sebelumnya ditempatkan di Guantanamo.¹¹ Jika individu-individu ini kembali ke Kuba, mereka dapat masuk ke AS melalui negara penempatan mereka. Ini adalah salah satu jalur kemanusiaan untuk eksodus. Ada juga “Special Program for Cuban Migration”, lebih dikenal dengan “Cuba Visa Lottery” ini dibuat dalam perjanjian antara pemerintah Kuba dan AS dalam US-Cuba Migration Accord” pada tahun 1994¹². AS berkomitmen untuk memproses setidaknya 20.000 permohonan per tahun. Para pemohon yang masuk kualifikasi tidak mendapatkan visa, namun “surat transportasi” dan harus

¹⁰ Norman, L. Zucker and Naomi Flink Zucker, *Desperate Crossings: seeking refugee in America*, New York: M.E. Sharpe, 1996.

¹¹ Dirlis oleh Bureau of Population, Refugees and Migration, September 2002. <http://www.state.gov/g/prm/refadm/rls/2002/13892.htm>

¹² <http://usembassy.state.gov/havana/wwwhacco.html>.

mendapat izin keluar dari otoritas Kuba. Meskipun selama ini Kuba memang dianggap sebagai sebuah ancaman bagi warga AS, fakta bahwa migrasi dari daerah tersebut adalah salah satu bentuk isu keamanan, dan kadang bahkan dianggap sebagai isu panas dalam politik AS.

Namun, tidak ada satu negara pun di wilayah tersebut yang bergabung dengan AS dalam pendekatannya terhadap pengungsi Kuba (meskipun beberapa telah dipulangkan ke Kuba dari Guantanamo). Pendekatan AS terhadap pengungsi Kuba menjadi identitas AS sebagai negara yang sangat menolak komunisme diseluruh dunia, di wilayah Barat khususnya. AS dan Kanada secara signifikan konsen pada program penempatan pengungsi, yang juga berperan penting dalam mendefenisikan karakteristik dua negara ini. Mereka negara yang konsen dan isu kemanusiaan (meskipun bagi negara Eropa hal ini ditanggapi secara berbeda yaitu dua negara ini cocok disebut sebagai negara bagi migran).

AS dapat menampung sampai 70.000 pengungsi setiap tahunnya dalam programnya dengan seleksi kelompok yang diidentifikasi sebagian dengan cara menganalisa tujuan politik luar negeri AS dan melobi politik domestik dan sebagian yang lain dengan menganalisa kebutuhan pengungsi dan melakukan seleksi individu. Kanada menargetkan 7.500 pengungsi ditangani oleh pemerintah dan 4.000 ditangani oleh lembaga yang mau mendanai kehidupan pengungsi. Program ini jelas berbeda dengan program yang dibuat oleh AS khususnya pada seleksi individu (tidak ada seleksi kelompok) dan kemungkinan adanya pihak swasta yang berkenaan mendanai pengungsi. Namun pada prinsipnya sama: dua negara ini, seperti halnya juga Australia, Normegia, Selandia Baru dan enam negara anggota UE mengidentifikasi dan mengorganisir kedatangan pengungsi setiap tahunnya. Program-program ini mencerminkan karakter kemanusiaan sebagai negara tujuan. Mereka menolak memberi perlindungan terhadap sejumlah orang yang tiba secara spontan, tanpa adanya dokumen lengkap dan alasan yang jelas. Keterkaitan arus pengungsi dengan isu keamanan sesuai dengan kondisi di Afrika dan Asia. Konvensi OAI 1969 menyatakan bahwa negara-negara Afrika khawatir “masalah pengungsi adalah sumber terjadinya friksi dengan negara lain, dan mereka ingin menghapus sumber friksi tersebut.¹³ Untuk alasan ini, pada artikel 2.2: menjamin pengungsi untuk mendapatkan perlakuan yang baik dan secara kemanusiaan bukan dengan cara yang tidak baik oleh negara anggota. Negara-negara OAU juga khawatir bahwa kaum militan dan insurgensi dapat dengan mudahnya menyelundup di antara pengungsi karena itu dalam Konvensi disebutkan bahwa mereka akan berupaya untuk menempatkan pengungsi jauh dari wilayah perbatasan.

Ada mekanisme regional yang mungkin bisa disepakati bersama (khususnya dalam pengungsi skala besar) terkait dengan krisis pengungsi di Afrika, meskipun hal ini tidak berarti bahwa setiap negara harus menangani isu pengungsi dengan cara yang sama, atau mungkin ada upaya koordinasi dalam menangani kasus pengungsi, dimana pengungsi mungkin bisa dipindahkan dari satu negara ke negara lain- atau mungkin perlindungan pertama terhadap pengungsi bisa dilakukan di negara yang termasuk kategori “aman”. Di kawasan Asia, tidak ada koordinasi regional maupun kesepakatan regional terkait dengan aturan hukum pengungsi, meskipun telah ada sejumlah penandatanganan Konvensi dan Protokol internasional mengenai status pengungsi.¹⁴ Contohnya Tantangan keamanan

¹³ Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa, 1001 UNTS 45, entered into force June 20, 1974. Preamble para 3.

¹⁴ Supang Chantavanich on Asia in “Regional Approaches to Forced Migration”; Joanne van Selm, Khoti Kamanga, John Morrison, Aninia Nadig, Sanja Spoljar, Vrzina and Loes van Willigen (eds). *The Refugee Convention at Fifty: a view from Forced Migration Studies*, Lanham: Lexington Books, 2003.

kamp-kamp pengungsi di Pakistan, dimana pengungsi Afghan berdatangan selama bertahun-tahun, dan dari mereka ada yang berasal dari komunitas Taliban dan kelompok-kelompok lain yang mungkin terkait dengan Taliban juga, namun penangangan pengungsi ini tetap tidak ada koordinasi dengan wilayah manapun. Dalam menghadapi arus pengungsi skala besar, negara-negara seperti Pakistan dan Iran tidak berkeinginan untuk membuat mekanisme yang meluluskan penerimaan pengungsi di negara mereka untuk jangka waktu yang lama, dan juga tidak ada melakukan kerjasama regional terkait dengan isu ini. Mungkin bagi kedua negara ini, keamanan internalnya akan jauh lebih aman jika mereka menutup mata terhadap kasus ini atau lebih baik membiarkan agensi-agensi internasional menawarkan bantuan kemanusiaan dan bekerja di negara mereka.

Isu mengenai perlindungan pengungsi, terkait dengan konteks regional, menyentuh identitas regional, keamanan, dan perbatasan. Negara-negara anggota UE melihat sebuah pendekatan regional merupakan kebutuhan dalam zona perbatasan mereka yang bebas namun belum berhasil menyelesaikan friksi dari proses masuk sampai dengan siapa yang dianggap membutuhkan perlindungan. Ini salah satu alasan yang menjadi fokus “Protected Entry Procedures” dan resettlement; yang mengatur masuknya para pencari suaka (dibawah PEP) dan pengungsi (melalui resettlement).¹⁵ Menjamin perlindungan adalah bentuk salah satu identitas humanitari negara-negara Eropa-meskipun ada tantangan tersendiri yang dihadapi termasuk penolakan terhadap sistem yang ada. Penerimaan terhadap aturan perlindungan pengungsi penting dalam mempertahankan keamanan regional, ini sudah dibuktikan oleh masyarakat Eropa terhadap Kosovo dan di Konvensi OAU.

Penutup

Migrasi dan kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk menangani immigrasi, menunjukkan bahwa issu ini dipandang positif oleh negara. Khususnya pada kasus dimana negara melakukan peningkatan terhadap aturan-aturan ekonomi, dan oleh karena itu perlu adanya aturan yang mengatur arus masuk di perbatasan yang memiliki tujuan ekonomi. Untuk kasus ekstrim yang terkait dengan migrasi, UE memandang bahwa mobilitas antar negara UE baik untuk jangka waktu pendek maupun panjang adalah sesuatu yang positif yang secara potensial bisa membangun identitas kawasan.

Individu-individu di Eropa memanfaatkan peluang ini, meskipun sejumlah bentuk migrasi pun menjadi meningkat. Rasa percaya merupakan elemen penting dalam membuat kesepakatan yang berhubungan dengan issu migrasi, termasuk melintasi perbatasan untuk alasan ekonomi, kebijakan dalam pemberian visa dan perlindungan terhadap pengungsi. Rasa percaya itu terdiri atas yakin bahwa negara tetanggumu tidak akan mengizinkan warga negara yang tidak mendapat izin keluar dari negaramu untuk memasuki negaranya dan yakin satu sama lain akan menerima kedatangan pengungsi karena merupakan tindakan kemanusiaan dan bukan justru membuat pernyataan politik yang bertentangan

¹⁵ Gregor Noll, Jessica Fagerlund and Fabrice Liebaut, Study on the feasibility of processing claims outside the EU against the background of the common European asylum system and the goal of a common asylum procedure, Brussels: European Commission, Directorate-General for Justice and Home Affairs, 2003, and the Study on the feasibility of setting up Resettlement Schemes, op. cit. Dua studi ini menjadi bahan diskusi pada seminar yang diselenggarakan oleh Kepresidenan Italia di Roma pada Oktober 2003. Judul seminar ‘Towards More Orderly and Managed Entry in the EU of Persons in need of International Protection’.

dengan kemanusiaan (dalam konteks Afrika). Dalam membuat kebijakan imigrasi, pemerintah berupaya untuk menghindari friksi di perbatasan dengan negara tetangga, dan memaksimalkan sejumlah jalur legal dan berupaya meminimalkan sejumlah kasus migrasi tanpa dokumen ketika melewati perbatasan.

Pemerintah juga berupaya membuat kebijakan yang “smart border” karena berhubungan dengan masalah keamanan dan komunitas secara keseluruhan tidak hanya pada satu negara saja. Kita masih jauh dari situasi dimana semua pelaku migrasi dari negara manapun dipandang positif oleh negara penerima dan masyarakat mereka. Kehidupan yang dihadapi para migran di daerah baru mereka adalah sesuatu yang penuh dengan ketidakpastian dan sikap-sikap yang kurang ramah dari tetangga-tetangga baru mereka. UE mengatur migrasi antar UE, pelaku-pelaku migrasi ini berkontribusi terhadap perkembangan globalisasi, multikultural dan integrasi dunia. Fakta yang tidak terbantahkan mengenai, apakah migrasi dipandang sebagai sesuatu yang positif atau tidak tergantung pada siapa yang melakukan migrasi, kemana dan darimana mereka berasal, dan siapa yang mengawasi mereka.

Daftar Pustaka

Buku

- Chantavanich, Supang on Asia in “Regional Approaches to Forced Migration”; Joanne van Selm, Khoti Kamanga, John Morrison, Aninia Nadig, Sanja Spoljar, Vrzina and Loes van Willigen (eds). *The Refugee Convention at Fifty: a view from Forced Migration Studies*, Lanham: Lexington Books, 2003.
- Meyers, Deborah Waller “Does” Smarter lead to safer” an assesment of the Boarder Accords with Canada and Mexico’, MPI Insight, No. 2 June 2003.
- Newman, Edward and Joanne van Selm 9eds), *Refugees and Forced Displacement: International security, Human Vulnerability and the State*, Tokyo: UNU Press, 2003.
- Sassen, Saskia; *Globalization and Its Discontents*, New York: New York Press, 1998.
- Selm, van Joanne-Thorburn and Verbeek, Bertjan “The Chance of a Lifetime? The European Community’s foreign and refugee policies towards the conflict in Yugoslavia, 1991-95’, in Pat Gray and Paul’ t Hart (eds), *Public Policy Disasters in Western Europe*, London: Routledge, 1998.
- Zucker, L Norman and Naomi Flink Zucker, *Desperate Crossings: seeking refugee in America*, New York: M.E. Sharpe, 1996.

Laporan

- Laporan SOPEMI, Trends in International Migration Report and IOM’s World Migration Report, dari 2002 dan 2003.
- Commission of the European Communities, *Communication from the Comission: Paving the way for a New Neighbourhood Instrumen*, Brussels, 1 Juli 2003 COM (2003) 393 final, p.4, paragraf 6.
- Commission of the European Communities, Staff Working Paper, Evaluation of the Dublin Convention, Brussels, 13.06.2002, SEC (2001) 756. Hanya 1.7 persen dari seluruh pencari suaka di negara-negara UE yang ditransfer ke negara lain pada tahun 1998-1999 sebagai hasil dari Konvensi Dublin.

Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa, 1001 UNTS 45, entered into force June 20, 1974. Preamble para 3.

Gregor Noll, Jessica Fagerlund and Fabrice Liebaut, Study on the feasibility of processing claims outside the EU against the background of the common European asylum system and the goal of a common asylum procedure, Brussels: European Commission, Directorate-General for Justice and Home Affairs, 2003, and the Study on the feasibility of setting up Resettlement Schemes, op. cit. Dua studi ini menjadi bahan diskusi pada seminar yang diselenggarakan oleh Kepresidenan Italia di Roma pada Oktober 2003. Judul seminar ‘Towards More Orderly and Managed Entry in the EU of Persons in need of International Protection’.

Websites:

L'auberge Espagnole, film director oleh Cedric Klapisch,
<http://www.marsfilms.com/site/auberge/>.

Lihat Joanne van Selm, Tamara Woroby, Erin Patrick and Monica Matts, Study on feasibility of setting up Resettlement Schemes in the EU member states or at EU level against the background of Common European asylum system and the goal of a common asylum procedure, at
http://www.european.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/asylum/studies/resettlement-study-full_2003_e.pdf.

Dirilis oleh Bureau of Population, Refugees and Migration, September 2002.
<http://www.state.gov/g/prm/refadm/rls/2002/13892.htm>
<http://usembassy.state.gov/havana/wwwwhacco.html>.